

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan percepatan pembangunan desa telah diupayakan. Sebenarnya upaya ini adalah upaya agar tercipta sebuah peningkatan kualitas hidup guna mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Pembangunan desa memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah agar terselenggaranya efektivitas kinerja pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terciptanya pelayanan publik yang baik, dan meningkatkan daya saing antar desa. Pelaksanaan implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini sudah gencar dilaksanakan sejak tahun 2015 dalam rencana kerja pemerintah.

Dalam perjalanan pengimplementasian UU Desa ini terjadi banyak kegelisahan yang dirasakan oleh Pemerintah Desa. Hal itu terjadi dikarenakan kompleksitas aturan yang ada dalam UU Desa ini. Dewan Riset Pemerintah Daerah Jawa Timur yang mengadakan Seminar dan Lokakarya tentang tantangan dan peluang pasca berlakunya UU Desa. Pada pertemuan itu, sejumlah kepala desa menyampaikan kegelisahan mereka terhadap minimnya kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan amanat undang-undang desa¹.

¹ Sulismandi, Wahyudi, Muslimin, Salahudin. Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Tahun Ke 1 (2016) dari Rencana Tiga Tahun. *Model Penguatan Kapasitas*

Kegelisahan yang dirasakan para pemerintah desa karena minimnya kapasitas dalam menjalankan amanat pemerintah yang dituangkan melalui UU Desa ini memang benar adanya. Dalam buku yang sama dijelaskan bahwa persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah desa masalah kuantitas perangkat desa. Kendati demikian, pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing².

Hal yang dilakukan oleh pemerintah guna mendukung terlaksananya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini adalah dengan melakukan sebuah pendampingan desa. Terkait dengan pendampingan desa, dasar hukum yang mengatur adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa³. Pendampingan dalam hal ini ada beberapa hal diantaranya pendampingan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan⁴. Pendampingan yang dilaksanakan dirasa bukan hanya untuk masyarakat saja namun pelaksana kegiatan pemerintahan yang ada di desa sangat perlu diadakannya pendampingan dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku aparat pemerintah yang ada di desa.

Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. September 2016. Hal: 1

² Ibid. hal: ix

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 112, Ayat 4

Pendampingan desa ini sudah seharusnya dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa. Tenaga pendamping ini harus disebar ke berbagai sektor pemerintahan diantaranya pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan juga tingkat desa. Agar proses pendampingan yang dilaksanakan dapat tersebar merata ke berbagai daerah. Adanya pendamping desa bertujuan agar percepatan pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan maksimal. Agar penggunaan dana desa yang sudah ditetapkan pemerintah dapat dipergunakan se maksimal mungkin terkait permasalahan pembangunan di desa. Kegiatan prioritas pemakaian dana desa ini, diantara untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pengembangan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Sebelum diadakannya program tentang pendamping desa ini, ada yang namanya fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) pada masa lalu tepatnya tahun 2007. Kinerja fasilitator tersebut berada diluar pemerintahan desa. Program ini tujuan utamanya sama, yaitu meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Namun seiring berakhirnya program ini di akhir bulan Desember 2014, maka digantikan dengan istilah pendamping desa ini. Tugas pendamping desa ini akan sangat kompleks karena dalam hal ini pendamping desa akan bekerja didalam sektor pemerintahan desa dan di luar sektor pemerintahan desa khususnya di masyarakat. Dengan adanya upaya pemerintah tentang pendamping desa ini diharapkan dapat membantu tugas pemerintah dalam upaya pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 tentang pelaksana Undang-Undang Desa Pasal 128 sampai Pasal 131 dengan sub paragraf Pendampingan Masyarakat Desa menyatakan bahwa “istilah Pendamping Desa bukanlah dimaksudkan untuk membatasi wilayah tugas pendamping, melainkan sebagai sebutan pendamping yang direkrut untuk mengawal implementasi Undang-Undang Desa.” Pendamping desa di level Desa tetap dipegang oleh kader pemberdayaan masyarakat dan dengan demikian, dalam satu kecamatan bisa saja hanya akan ada 2 orang pendamping Desa atau menyesuaikan dengan jumlah desa dalam kecamatan terkait⁵. Dari pernyataan tersebut memang seharusnya bukan di setiap desa itu wajib memiliki seorang pendamping desa. Apabila ada asumsi seperti itu maka nantinya dalam sistem pemerintahan desa akan terjadi tumpang tindih pekerjaan dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pendapat yang dikemukakan oleh ketua DPD Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) Provinsi Jawa Timur Nurrahman Joko Wiryanu "Setiap kecamatan minimal dibutuhkan sekitar 3 orang fasilitator pendamping desa, yakni sebagai fasilitator pemberdayaan, fasilitator keuangan, dan fasilitator teknis⁶." Fenomena yang terjadi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang Tahun kerja 2017-2018 memperlihatkan bahwa memang adanya pendamping desa berjumlah 3 orang, yang masing-masing memiliki tugas dalam bidang fasilitator pemberdayaan yang berjumlah 2 orang, dan fasilitator teknis infrastruktur 1 orang. Di Kecamatan Wagir sendiri itu terdiri dari 12 Desa, yaitu Desa Dalisodo, Desa

⁵ Pakkat, Parestokrat Naek. Sarjana Hukum dalam Skripsi. *Peran Tenaga Pendamping Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Upaya Optimalisasi Pembangunan Desa*. Universitas Pasundan Bandung. 2016, Hal: 7

⁶ <https://daerah.sindonews.com/read/1009761/151/jumlah-pendamping-desa-masih-minim-1433651226>, diakses pada Selasa 23 Januari 2018, pukul 11.09 WIB

Gondowangi, Desa Jedong, Desa Mendalanwangi, Desa Pandanlandung, Desa Pandanrejo, Desa Parangargo, Desa Petungsewu, Desa Sidorahayu, Desa Sitirejo, Desa Sukodadi, dan Desa Sumbersuko yang juga hanya memiliki 3 Pendamping Lokal Desa (PLD) dan masing-masing PLD ini mendampingi 4 desa.

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang merupakan salah satu kecamatan yang berada pada bagian tengah utara kabupaten Malang. Keadaan geografis Kecamatan Wagir ini menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang cukup strategis, karena jalur transportasi dari arah utara dan selatan yang semakin hari semakin ramai. Luas kawasan Kecamatan Wagir secara keseluruhan adalah sekitar 75,43 km² atau sekitar 2,53 persen dari total luas Kabupaten Malang, dan berada pada urutan luas terbesar ketujuhbelas dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang⁷. Sekilas penjelasan diatas menunjukkan bahwa potensi yang ada di wilayah ini sangat menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Oleh karena itu mengkaji tentang aktor yang berperan dalam menjalankan atau membangkitkan kegiatan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi masyarakat merupakan satu hal yang baik. Sehingga kita tahu bahwa penggerak roda pembangunan di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini yaitu para pendamping desa yang bekerja dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Tujuan pendamping desa pada PermendesPDTTrans Pasal 2 huruf (a) berbunyi “meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.” Dari cuplikan peraturan menteri tersebut, adanya pendamping desa ini adalah agar dapat mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan

⁷ http://wagir.malangkab.go.id/?page_id=5, diakses Sabtu 24 Februari 2018, pukul 16.17 WIB

masyarakatnya. Dengan adanya pendamping desa diharapkan dapat tercipta suatu pelaksanaan kinerja pemerintah desa yang maksimal. Karena pemerintah desa harus dapat mengendalikan kegiatan pemerintahan yang ada di desa guna terlaksana pelayanan publik yang efektif. Sehingga pelaksanaan kegiatan administratif desapun dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pedoman pelaksanaan tujuan dari pendamping desa ini terdapat dalam PermendesPDTTTrans BAB III tentang Manajemen Pendampingan Desa Pasal 23 dan 24 yang masing-masing membicarakan tentang rekrutmen dan kompetensi pendamping desa.

Pada Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa Rekrutmen Pendamping Desa, Pendamping Teknis dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dilakukan secara terbuka. Dalam artian bahwa siapapun yang ingin menjadi kader pendamping desa dapat langsung mendaftarkan dirinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan perekrutan ini dilakukan secara transparan tanpa ada campur tangan kepentingan politik didalamnya.

Untuk memperjelas mengenai kriteria kader pendamping desa yang ingin mengabdikan dirinya sebagai pendamping desa, dijelaskan dalam PermendesPDTTTrans Pasal 24 tentang Kompetensi Pendamping Desa⁸, dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memberdayakan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Selain dengan adanya peraturan tersebut ada juga kualifikasi pendamping desa yang dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2017 lalu. Ada 5 klasifikasi yang disebutkan diantaranya, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP), Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), dan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)⁹. Dari klasifikasi yang ada ini sudah ditetapkan masing-masing kualifikasi akademik yang ditentukan. Hal itu bertujuan agar calon pendamping desa yang akan mendaftarkan dirinya sesuai dengan sasaran klasifikasi pendamping desa itu sendiri. Karena pendamping desa ini tidak hanya membicarakan masalah administrasi pemerintahan desa yang berkecimpung tentang dana desa saja. Banyak yang harus diketahui bahwa ada beberapa macam klasifikasi pendamping desa. Sehingga masalah yang harus ditangani setiap pendamping desa ini harus sesuai dengan klasifikasi masing-masing.

Di Kecamatan Wagir sendiri para pendamping desa yang berjumlah 3 orang ini sudah memenuhi kriteria yang tertuang dalam penjabaran Permendes PDTTTrans No.3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping memiliki pengalaman yang cukup dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Namun yang saya temui di lapangan, masih ada pendamping desa yang

⁹ <http://www.islamaceh.com/2017/08/kualifikasi-dan-persyaratan-resmi-untuk-penerimaan-pegawai-baru.html> diakses pada Selasa 23 Januari 2018 pukul 10.45 WIB

masih kurang tegas dalam menjalankan tugasnya. Masih ada keraguan dalam memberikan sosialisasi program dari pemerintah. Padahal program tersebut sangat penting untuk disosialisasikan dengan jelas kepada Sekertaris desa dan para Operator desa yang hadir. Masih juga ada pendamping desa yang kurang dapat berbaur dengan seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat awam yang baru mengenal pendamping desa nampak agak ragu untuk berdiskusi dengan. Hal ini perlu lebih di pelajari lagi karena aspek yang dikedepankan bukan hanya pengalaman pengabdian terhadap desa namun juga tentang kepekaan terhadap masyarakat serta kebiasaan masyarakat sekitar di Kecamatan Wagir sendiri.

Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur tentang manajemen pendampingan desa ini, akan dapat menyaring para calon pendamping desa yang profesional. Karena adanya kompetensi yang dimiliki oleh pendamping desa ini sangat berpengaruh terhadap peran pendamping desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap pelaksanaan pendampingan desa. Apabila proses pendampingan desa ini berjalan dengan efektif, maka desa akan menjadi sebuah subjek perubahan yang berarti.

Dengan demikian desa akan dapat menjadi subjek penggerak pembangunan di Indonesia. Sesuai dengan nawacita pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Maka desa akan mampu melakukan pergerakan yang berarti untuk Indonesia. Karena desa adalah pondasi utama yang harus diperbaiki dalam hal pembangunan di Indonesia.

Seiring dengan pengimplementasian peran pendamping desa ini pasti ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi ini biasanya karena masih kurang maksimalnya peran dari pendamping desa itu sendiri. Permasalahan yang terjadi bisa saja dari berbagai faktor, baik dari faktor masyarakat, faktor pemerintah, bisa jadi faktor dari pendamping desa itu sendiri. Kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbang Kabupaten Kendal, yaitu 1) Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah; 2) jumlah tenaga pendamping desa; 3) kekosongan jabatan kepala desa;¹⁰. Harus ada kerjasama antar pelaku kegiatan pembangunan desa agar tercipta sebuah pembangunan desa yang mandiri dan berkompeten.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: a) Kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan karna hanya berjumlah 1 (satu) orang saja. b) Keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan di desa. c) Kerjasama perangkat desa masih kurang, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan pendamping desa¹¹. Memang perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antar pendamping desa dan pemerintah desa. Karena tugas dan peran pendamping desa juga sama-sama strategisnya dengan pemerintah desa. Para pendamping harus saling berkolaborasi dalam hal kinerja pembangunan desa.

¹⁰ Susanti, Martien Herna, *Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*, Jurnal, No.1/Th.XXVIII/2017, Januari-Juni 2017, Hal 38-39

¹¹ Pahlevi, Reza, *Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pagung Raharjo Kabupaten Lampung Timur*, Jurnal Ilmiah, 2017, Hal 15

Untuk penilaian kurangnya peran itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek *pertama* bisa dari kurangnya pengalaman kerja para pendamping desa. Artinya pendamping masih kurang pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa atau Pemberdayaan Masyarakat. Karena dalam hal tersebut dijelaskan bahwa Pendamping Desa ini masing-masing latar belakang pendidikan memiliki minimal satuan tahun pengalaman kerja yang berbeda-beda.

Aspek *kedua* dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pendamping desa. Spesifikasi pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kemdes PDTTrans sudah jelas harus dipenuhi. Tidak hanya karena pengalaman saja yang harus dipenuhi, pendidikan yang memadai juga harus dipenuhi oleh para Pendamping Desa. Karena pendidikan dasar yang dimiliki oleh para Pendamping Desa ini sangat berpengaruh terhadap peran pendamping. Karena ilmu pengetahuan formal yang pendamping dapat akan mempermudah pendamping untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat kepada masyarakat bahkan kepada para pemerintah desa yang dirasa butuh pendampingan dalam penyelesaian tugas administratif desa.

Aspek *ketiga*, dapat dilihat dari kerjasama pemerintah desa, masyarakat, serta pihak ketiga yang bekerjasama dengan pendamping desa itu sendiri. Kerjasama yang baik dalam kinerja pembangunan desa itu menciptakan suatu hasil yang baik pula. Karena masing-masing pelaku kegiatan pembangunan desa ini sama-sama memiliki tugas yaitu meluncurkan program pembangunan yang ada di desa. Oleh sebab itu kemampuan dan tugas berbeda yang dimiliki masing-masing subjek pembangunan desa ini dapat dijadikan acuan untuk sama-sama menyelesaikan tugas pendamping dalam hal pembangunan desa.

Melihat kejadian dan permasalahan yang terjadi tentang Pendamping Desa, ternyata dalam hal ini keefektifan peran Pendamping Desa dinilai dari banyak hal dan masih harus berpegang teguh pada dasar hukum yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 dan harus sesuai dengan kriteria perekrutan awal Pendamping Desa. Kedua dasar ini harus dilaksanakan dengan benar karena dasar tersebut menjadi sebuah pedoman baik buruknya peran para Pendamping Desa.

Adanya pemikiran yang kurang baik oleh masyarakat tentang Pendamping Desa menjadi sebuah koreksi besar yang harus dilakukan oleh pemerintah kita. Banyak hal yang harus diupayakan oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan kasus tersebut. Pemberdayaan dan pelatihan untuk penguatan kapasitas pendamping desa harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, agar pengetahuan yang dimiliki oleh pendamping desa dapat diperoleh dengan maksimal. Karena pendamping desa merupakan motor penggerak bagi pemerintahan yang ada di desa. Oleh sebab itu, mengingat peneliti merupakan Mahasiswi Ilmu Pemerintahan maka sangat penting bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Pendamping Desa. Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti mengangkat judul penelitian, yaitu **“Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka pokok permasalahan yang akan ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pernyataan ruang lingkup kegiatan yang akan di angkat dengan dasar inti permasalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Perumusan dari tujuan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-fakor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Pada setiap penelitian sangat diharapkan adanya manfaat baik secara akademis maupun secara praktis yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, yakni:

1. Secara akademis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terutama pembahasan terkait bagaimana Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir , Kabupaten Malang. Serta dapat dipergunakan sebagai suatu informasi bagi pihak lain yang berminat dan terinspirasi dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangsih serta inspirasi dengan membawa manfaat praktis terhadap disiplin Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai acuan pemerintah desa, pendamping desa, maupun pihak-pihak lainnya.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan fisualisasi teori yang dapat ditarik dari sebuah latar belakang yang sudah di jabarkan dan merupakan teori-teori yang akan kita bahas. Bergerak berdasarkan latar belakang yang sudah ada, maka definisi konseptual yang akan diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkata kualitas hidup dan kehidupan untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat Desa¹². Pembangunan desa tidak terlepas dari dari konteks manajemen pembangunan darah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan, dan kabupaten dan antarkabupaten¹³. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan¹⁴. Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

¹² Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9

¹³ Wahjudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

¹⁴ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006, Hal: 3

Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri ini adalah hal yang sangat penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan yang namanya proses perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa yang baik. menciptakan sebuah pembangunan desa yang efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan yang akan di ambil dalam prioritas kegiatan. Proses perencanaan yang baik, maka akan menimbulkan sebuah program yang baik pula. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program tersebut. Wujud nyata sebuah kewenangan dalam mengatur pembangunan desa adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjenjang meliputi¹⁵:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

¹⁵ Kessa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Cetakan Pertama, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, Hal 19

2. Pendampingan

Menurut Suherlan (2004) pendampingan merujuk pada upaya-upaya memberi kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang di hadapi¹⁶. Jadi upaya pendampingan ini merupakan usaha yang dilakukan agar orang lain mendapat kemudahan dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang di hadapi.

Menurut buku Bina Desa (2011) pendampingan dipandang sebagai upaya yang dilakukan oleh orang yang secara aktif membangun hubungan perkawanan dengan komunitas marginal¹⁷. Jadi yang dimaksudkan ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dengan suka rela aktif menjalin pertemanan dengan kelompok orang yang dianggap terpinggirkan atau kaum minoritas.

3. Pendamping Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pelaksana pendampingan desa ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tenaga pendamping profesional, kader

¹⁶ Suherman, dalam Lobo, Albertina Nasri, Tesis, *Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua)*, Depok, 2008, Hal: 5

¹⁷ Bina Desa dalam Lobo, Albertina Nasri, Tesis, *Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani Oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Papua Provinsi Papua)*, Depok, 2008, Hal: 5

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan pihak ketiga. Pelaksana tugas ini sudah ditetapkan mengenai penempatan kerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tenaga pendamping profesional yang dimaksudkan dalam peraturan Menteri tersebut didalamnya terdiri atas Pendamping Desa. Pada peraturan Menteri tersebut dijelaskan pada Pasal 6 yang berbunyi “Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) berkedudukan di kecamatan.” Sudah ditetapkan dengan jelas mengenai penempatan sektor kinerja pelaksana pendampingannya. Karena pendamping adalah agen pemerintah yang memiliki kemampuan dan kualifikasi tertentu dalam melaksanakan program pendampingan desa.

Tujuan pendampingan desa meliputi: 1) meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; 2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; 3) meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan 4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris¹⁸.

Hal-hal yang harus dipahami mengenai tujuan pendampingan bagi para pendamping desa ini merupakan sistem yang sudah ditentukan dari awal. Karena untuk menjadi seorang pendamping desa, pendamping harus melalui tahapan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh agen perekrut pendamping desa. Pemerintah memiliki kualifikasi yang sangat jelas

¹⁸ Susanti, Martien Herna, *Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*, Jurnal, No.1/Th.XXVIII/2017, Januari-Juni 2017, Hal: 31

tentang penempatan pendamping desa nantinya karena pendamping akan melaksanakan tujuan pendampingan yang harus diberikan secara profesional kepada masyarakat dan khususnya kepada aparat pemerintah desa sesuai dengan kemampuan para pendamping desa masing-masing.

F. Definisi Operasional

Berdasar pada definisi konseptual yang sudah ada di atas, maka dapat ditarik sebuah definisi operasional yang mana definisi operasional ini merupakan cerminan dari rumusan masalah yang ada dan merupakan inti kajian lebih lanjut dari latar belakang yang sudah diambil oleh peneliti. Definisi operasional tersebut diantaranya:

1. Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 12.
 - a. Mengarahkan dan mengontrol aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas pada proses perencanaan pembangunan desa sesuai dengan aturan yang ada.
 - b. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa.
 - c. Pengorganisasian terhadap tata kelola keuangan desa.
 - d. Memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap kader-kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- e. Membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.
 - a. Tersedianya Sumber Daya berupa Pendamping Desa
 - b. Pengetahuan akademik (Pendidikan) yang dimiliki oleh Pendamping Desa

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁹. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti²⁰.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan cara mendeskripsikan tentang Efektivitas

¹⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013, Hal: 2

²⁰ Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, Hal: 9

Peran Pendamping Desa dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya²¹.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ada 2 (dua) sumber data, yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

- a) **Data Primer**, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari objek atau narasumber yang diteliti. Sumber data primer ini diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan kepada pegawai pemerintah yang ada di Kantor Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Beberapa Pendamping Desa yang ada di Kecamatan Wagir tersebut.
- b) **Data Sekunder**, merupakan data yang diperoleh dari studi peneliti lain seperti (jurnal, arsip, penelitian terdahulu), studi kepustakaan, internet, peraturan perundang-undangan, maupun dari sebuah dokumen resmi dari Kecamatan maupun pihak Pendamping Desa.

²¹ Hadari, Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University, 1991, Hal: 63

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data²². Beberapa teknik yang ada untuk menggali informasi guna mendapatkan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan²³. Creswell memberikan sedikit pendapatnya tentang sebuah observasi bahwa *“The type of challenges experienced during observations will closely relate to the role of the inquirer in observation, such as whether the researcher assumes a participant, nonparticipant, or middle-ground position²⁴.”* Menurut Creswell observasi ini merupakan jenis tantangan yang dialami selama pengamatan yang akan erat kaitannya dengan peran peneliti dalam observasi, misalkan saja seperti apakah peneliti mengasumsikan jika ada peserta, jika tidak ada peserta, atau bisa juga bagaimana peneliti melakukan itu kepada kalangan orang menengah kebawah.

²² Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013, Hal: 224

²³ Hadi, Sutrisno, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013, Hal: 145

²⁴ John. W Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches- 2nd edition*, California, SAGE Publications Inc, 2007, Hal: 139

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan untuk melihat fenomena secara langsung terkait efektivitas peran pendamping desa dalam menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai peran pendamping desa tersebut.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁵. Teknik ini dilakukan guna memperoleh informasi sebanyak-banyaknya melalui proses tanya jawab bebas dan mendalam. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di lingkungan Kantor Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan objek wawancara adalah aparatu pemerintah desa, beberapa pendamping desa, dan juga masyarakat yang terlibat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan penelaahan dokumen-dokumen yang sudah ada. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang²⁶. Dokumentasi yang diambil

²⁵ Esterberg, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013, Hal: 231

²⁶ Ibid, Hal: 240

ini dapat berupa dokumen resmi, hasil wawancara, dan juga dapat diambil dari foto, video, ataupun rekaman suara pada kegiatan yang dilakukan terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen ini sangatlah penting karena mengandung sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Terutama mengenai kegiatan pendamping desa dalam menjaankan tugasnya di Kecamatan Wagir.

3. Subjek Penelitian

Peneliti akan memfokuskan penelitiannya terhadap Efektivitas Peran Pendamping Desa dalam Menjalakna Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Maka dari itu peneliti akan menggali data langsung dari narasumber yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Penetapan beberapa subjek yang sudah dipilih, antara lain:

- 1) Camat Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- 2) Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- 3) (5 Orang) Aparat pemerintah desa di kawasan cakupan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
- 4) (3 Orang) Pendamping Desa
- 5) (3 Orang) Pendamping Lokal Desa
- 6) (5 Orang) Masyarakat di kawasan cakupan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya untuk mendapatkan data dan informasi yang sedang diteliti. Sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitiannya di Kantor Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, beberapa Kantor Desa yang ada di Kecamatan Wagir.

5. Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif mengenai efektivitas peran pendamping desa dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Pengertian dari analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁷.

Ada beberapa cara dalam menganalisis data menurut Creswell dan langkah-langkahnya antara lain adalah²⁸:

- 1) Penyiapan dan pengaturan data, di langkah pertama ini kita harus menyiapkan data dan mengatur data apa yang akan segera kita analisis. Dalam hal ini data yang dimaksudkan adalah data data

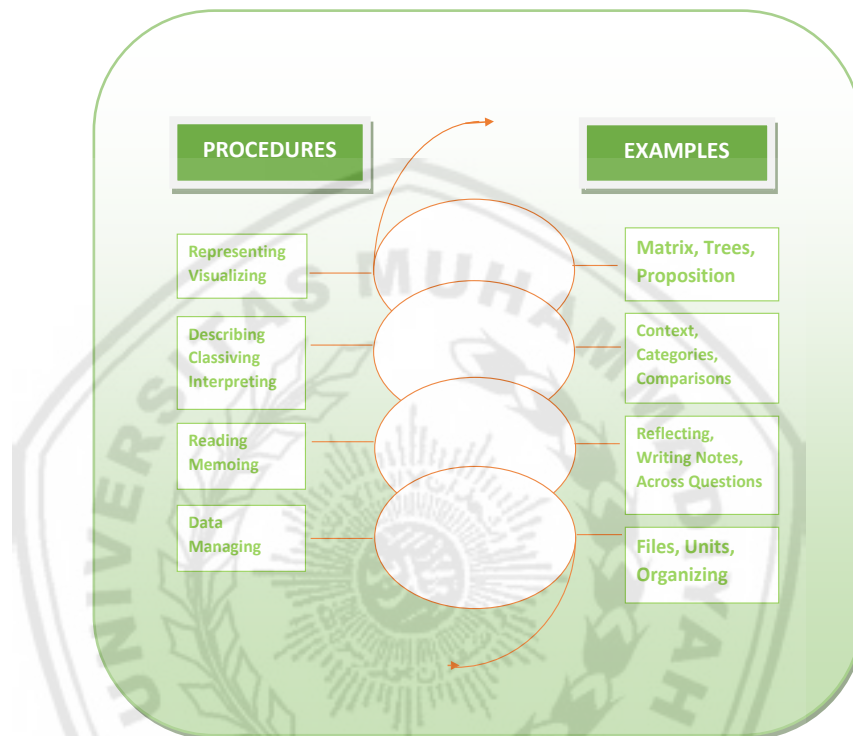
²⁷ Bogdan dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013, Hal: 244

²⁸ John. W Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches- 2nd edition*, California, SAGE Publications Inc, 2007, Hal: 148-154

observasi dan data interview seperti teks dalam transkrip, atau data gambar seperti foto.

- 2) Membaca data-data yang sudah kita siapkan dan kemudian dari data tersebut kita membuat sebuah catatan mengenai hal-hal yang kita anggap penting.
- 3) Mengurangi data kedalam tema melalui proses *coding* atau pengkodean dan pengkondensasian. Proses inti dari analisis data ada pada proses pengkodean. Dimana dalam proses ini terdapat proses pengurangan data menjadi segmen yang bermakna dan menetapkan nama atau segmennya. Artinya adalah memproses atau mengolah berbagai data yang telah kita analisis sehingga nantinya kita akan mendapatkan satu data yang tepat.
- 4) Kemudian menggabungkan kode kedalam kategori atau tema yang lebih luas. Maksudnya setelah kita mendapatkan data tersebut kita mulai menterjemahkan atau mendeskripsikan kategori data atau tema yang akan kita analisis lebih lanjut.
- 5) Menampilkan serta membuat perbandingan dalam grafik data, tabel dan bagan. Dalam tahap ini setelah kita mendeskripsikan kategori data atau tema yang sudah di analisis, maka selanjutnya akan membandingkan dan menyajikan data kualitatif dalam bentuk teks naratif (catatan lapang), tabel, grafik, serta bagan.

- 6) Dari beberapa tahapan diatas langkah terakhir kita dapat menarik kesimpulan dengan melihat keakuratan hasil penelitian sehingga kategori data tersebut dapat diartikan.



Gambar 1. Model Analisis Data Spiral

Sumber : The Data Analysis Spiral (John. W Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches-2nd edition*, California, SAGE Publications Inc, 2007, Hal: 151)